

RINGKASAN

AYU NABILA
NIM 210510228

**Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti
Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota
Lhokseumawe (Studi Penelitian di Wilayah
Hukum Polres Lhokseumawe)
(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. dan Husni,
S.H., M.H.)**

Lalu lintas merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang menuntut keteraturan demi kelancaran aktivitas sehari-hari. Namun, pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi akibat rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum pengguna jalan, yang berdampak pada tingginya angka kecelakaan. Untuk menindak pelanggaran tersebut, Kepolisian, khususnya Satlantas, diberi kewenangan melakukan penyitaan barang bukti sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 270 UU No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 38 KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyitaan barang bukti terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Polres Lhokseumawe serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam menjalankan tindakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian berada di Polres Lhokseumawe. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara terhadap informan dan responden. Proses analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyitaan barang bukti terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang jelas dan akuntabel, dimulai dari identifikasi pelanggaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, penerbitan Surat Tanda Penerimaan (STP), pencatatan administratif barang bukti, hingga pengembalian barang bukti setelah perkara selesai ditangani. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, antara lain keterbatasan sarana pendukung seperti tempat penyimpanan dan kendaraan operasional, ketidakjelasan dasar hukum dalam menangani jenis pelanggaran tertentu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi penyitaan, serta keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun pemahaman prosedural aparat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polres Lhokseumawe telah melakukan berbagai upaya perbaikan, seperti pelatihan internal untuk peningkatan kapasitas personel, koordinasi lintas unit untuk memperkuat sinergi pelaksanaan tugas, serta pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat agar tercipta kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

Saran kepada Polres Lhokseumawe untuk menyusun panduan prosedural baku (SOP) yang mudah dipahami oleh masyarakat serta menyelenggarakan forum dialog rutin antara kepolisian dan warga sebagai wadah untuk membangun kepercayaan dan meminimalisir resistensi sosial.

Kata Kunci : Penyitaan, Barang Bukti, Lalu Lintas.

SUMMARY

AYU NABILA
NIM 210510228

Implementation of Evidence Seizure in Traffic Violations in Lhokseumawe City (A Research Study in the Legal Jurisdiction of Lhokseumawe Police)
(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. and Husni, S.H., M.H.)

Traffic is an essential part of public life that requires order to ensure the smooth running of daily activities. However, traffic violations remain rampant due to the low level of awareness and legal understanding among road users, contributing to high accident rates. To address these violations, the police, particularly the Traffic Unit (Satlantas), are authorized to seize evidence in accordance with Article 270 of Law No. 22 of 2009 and Article 38 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP). This research aims to examine how the Lhokseumawe Police implement the seizure of evidence related to traffic violations, identify the obstacles encountered, and analyze the efforts made to overcome these challenges.

This study employs a qualitative method with an empirical juridical approach. The research location is at the Lhokseumawe Police Headquarters. Data were collected through literature review and field study using interviews with informants and respondents. Data analysis was carried out in four stages: data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing.

The findings reveal that the seizure of evidence by the Traffic Unit of Lhokseumawe Police is conducted through a clear and accountable process, including the identification of violations, verification of documents, issuance of a Receipt Letter (STP), administrative recording of evidence, and return of evidence after case resolution. However, the implementation faces several obstacles, such as limited support facilities (e.g., storage areas and operational vehicles), unclear legal basis for certain types of violations, low public understanding of the seizure function, and limitations in human resources, both in number and procedural competence. To address these issues, the Lhokseumawe Police have taken various improvement measures, including internal training to enhance personnel capacity, cross-unit coordination to strengthen task synergy, and persuasive as well as educational approaches to raise public legal awareness in traffic matters. It is recommended that the Lhokseumawe Police develop a standardized procedural guide (SOP) that is easy for the public to understand and conduct regular dialogue forums between the police and community as a means to build trust and reduce social resistance.

Keywords: *Seizure, Evidence, Traffic.*